



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1-2, Lamongan, Jawa Timur 62251,  
Telepon (0322) 321162, Faksimile (0322) 322690, Pos-el [bappeda@lamongankab.go.id](mailto:bappeda@lamongankab.go.id)  
Laman [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 20 Agustus 2025

Nomor : 500.14.4/1052/413.204/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (Dua) Berkas  
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu Manajemen  
Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Lamongan Semester I Tahun 2025

Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan  
di –  
Lamongan

Menindaklanjuti surat Inspektur Kabupaten Lamongan, tanggal 21 Juli 2025 Nomor : 700.1.2.1/112.1/LHP/413.201/2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini disampaikan dengan hormat Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu Manajemen Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Kabupaten Lamongan,



Sujanwo, S.T., M.M  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19740930 200112 1 005

Lampiran Surat 1

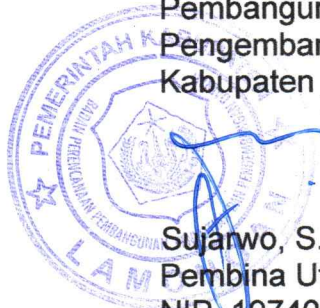
Nomor : 500.14.4/1052/413.204/2025

Tanggal : 20 Agustus 2025

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL REVIU MANAJEMEN RISIKO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
SEMESTER I TAHUN 2025**

NO.	REKOMENDASI/SARAN	TINDAK LANJUT
1	Perlu dilakukan perbaikan yakni menetapkan skala kemungkinan dan dampak dengan menambah jumlah responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (populasi) agar dapat menentukan skala prioritas dengan urutan besaran risiko mulai dari tertinggi hingga terendah.	Sehubungan dengan hal tersebut, Bappelitbangda telah melakukan penambahan jumlah responden dalam menentukan skala prioritas pada setiap pernyataan risiko strategis maupun operasional di lingkup Bappelitbangda Tahun 2025. Survei telah dilakukan dan terdokumentasikan secara langsung melalui aplikasi Simario dengan melibatkan lebih dari 50% jumlah pegawai Bappelitbangda (populasi).
2	Perlu dilakukan perbaikan yakni menetapkan risiko prioritas dan melakukan FGD untuk menetapkan risiko mana saja yang akan dilakukan RTP.	Sehubungan dengan hal tersebut, Bappelitbangda telah melakukan FGD dalam menentukan risiko prioritas yang akan dilakukan RTP pada Tahun 2025 (terlampir). Berdasarkan kegiatan tersebut telah disepakati risiko strategis dan operasional prioritas beserta RTP-nya yang telah dituangkan dalam dokumen Laporan Penilaian Risiko Bappelitbangda Tahun 2025.

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Kabupaten Lamongan,



Sujanwo, S.T., M.M  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19740930 200112 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Basuki Rahmad Nomor 1 Lamongan Kode Pos (62212)  
Telepon (0322) 321162 E-mail : [bappeda@lamongankab.go.id](mailto:bappeda@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id/bappelitbangda](http://www.lamongankab.go.id/bappelitbangda)

---

**NOTULENSI KEGIATAN**

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Februari 2025

Waktu : 09.00 - 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Bappelitbangda

Agenda : FGD Penentuan Risiko Prioritas Tahun 2025

Peserta : Seluruh Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan staf Bappelitbangda

**Agenda:**

- Pembukaan dan pengarahan.
- Paparan teknis mengenai metode penentuan skala risiko.
- Diskusi penentuan skala kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) risiko.
- Identifikasi dan prioritasasi risiko utama.
- Penyusunan daftar risiko prioritas untuk RTP.
- Penutup.

**1. Pembukaan**

- Rapat dibuka oleh Bapak Erwin Nurdiansah, SE., MM, Sekretaris Bappelitbangda Kab. Lamongan yang menyampaikan bahwa tujuan FGD ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama terkait skala risiko dan penentuan risiko prioritas yang akan ditindaklanjuti melalui RTP.

**2. Paparan Teknis**

- Narasumber dari Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Bappelitbangda Kab. Lamongan memaparkan metode penilaian risiko yang mengacu pada pedoman SPIP, meliputi:
  - Penentuan skor kemungkinan (*likelihood*) dan skor dampak (*impact*).
  - Matriks risiko sebagai alat pemetaan risiko.
  - Kriteria pengelompokan risiko menjadi tinggi, sedang, dan rendah.

### 3. Diskusi dan Penilaian Risiko

- Masing-masing bidang memaparkan daftar risiko sesuai proses bisnis dan tupoksi.
- Dilakukan penilaian skor kemungkinan dan dampak secara bersama-sama.
- Tim melakukan plotting risiko pada matriks risiko untuk menentukan tingkat signifikansi.

### 4. Penentuan Risiko Prioritas

- Disepakati sejumlah risiko dengan skala risiko berada di atas selera risiko yang perlu dilakukan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yaitu risiko yang memiliki skala di atas 4,00 atau dengan kategori Sedang.
- Risiko prioritas yang diidentifikasi antara lain (*terlampir*)

### 5. Penutup

- Pimpinan rapat menegaskan bahwa hasil penentuan skala risiko ini menjadi dasar penyusunan RTP.
- Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB

---

## Kesimpulan

- Telah ditetapkan skala risiko untuk seluruh risiko yang diidentifikasi.
- Disepakati daftar risiko prioritas yang akan menjadi fokus RTP tahun berjalan.
- Hasil FGD akan dituangkan dalam dokumen resmi RTP dan menjadi lampiran laporan pengendalian risiko.

Lamongan, 13 Februari 2025  
Notulen

ttd.

**A. RIZAL KHABIBI, S.M**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19970211 202012 1 005

## Daftar Risiko Prioritas

### - Risiko Strategis Organisasi (RSO)

Risiko		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
Uraian	Kode			
Tren perubahan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak terprediksi	RSO.25.36.10.01	3	2	6
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik	RSO.25.36.10.02	4	3	12
Perubahan kebijakan anggaran prioritas perangkat daerah	RSO.25.36.10.03	3	3	9
Monitoring dan pelaporan kinerja perangkat daerah tidak berjalan dengan optimal	RSO.25.36.10.04	4	3	12
Perubahan kebijakan anggaran program perangkat daerah	RSO.25.36.10.05	3	3	9
Monitoring dan pelaporan program pembangunan tidak berjalan dengan optimal	RSO.25.36.10.06	4	3	12
Implementasi program inovasi daerah tidak berjalan secara berkelanjutan	RSO.25.36.10.07	3	2	6
Legitimasi inovasi pelayanan publik yang kurang	RSO.25.36.10.08	3	2	6
Hasil penelitian dan kajian yang dilakukan tidak dapat diakomodir dalam perumusan kebijakan daerah	RSO.25.36.10.09	3	3	9
Menurunnya kapasitas manajerial aparaturnya perangkat daerah	RSO.25.36.10.10	3	2	6
Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif	RSO.25.36.10.11	3	2	6

- **Risiko Operasional Organisasi (ROO)**

<b>Risiko</b>		<b>Skala Dampak</b>	<b>Skala Kemungkinan</b>	<b>Skala Risiko</b>
<b>Uraian</b>	<b>Kode</b>			
Risiko Operasional Kegiatan: Program pengembangan sumber daya manusia tidak optimal	ROO.25.36.10.03	4	2	8
Risiko Operasional Kegiatan: Inefisiensi administrasi umum perangkat daerah	ROO.25.36.10.04	3	2	6
Risiko Kemitraan: Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.	ROO.25.36.10.05	4	2	8
Risiko Kebijakan: Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pendanaan	ROO.25.36.10.08	3	3	9
Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya kualitas analisis data	ROO.25.36.10.09	3	2	6
Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya sistem pengendalian dan evaluasi	ROO.25.36.10.10	3	2	6
Risiko Kebijakan: Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	ROO.25.36.10.11	3	2	6
Risiko Kebijakan: Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam	ROO.25.36.10.12	3	2	6
Risiko Kebijakan: Perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan tidak terarah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat	ROO.25.36.10.13	3	2	6
Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan	ROO.25.36.10.14	3	3	9
Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang social dan kependudukan	ROO.25.36.10.15	3	2	6
Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan	ROO.25.36.10.16	3	2	6
Risiko Kebijakan: Inovasi yang dikembangkan tidak dapat diimplementasikan secara berkelanjutan	ROO.25.36.10.17	2	3	6



## Dokumentasi Kegiatan

